



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0030 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA
KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045, kemacetan merupakan isu strategis perkotaan yang perlu ditangani melalui integrasi tata ruang, transportasi publik dan peningkatan prasarana jalan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah tersebut dan untuk mendukung upaya pengurai kemacetan dengan melaksanakan pembangunan fly over latumenten yang berdampak pada bangunan milik warga sehingga diperlukan langkah untuk pemindahan warga yang bermukim di area tersebut ke rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Dasar Pokok - Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1990 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
13. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Tanggap Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22034);
15. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan unit kerja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa;
17. Peraturan...

17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PERPINDAHAN WARGA KELURAHAN GROGOL KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan nama pemindahan warga Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Terhadap warga yang dipindahkan agar dapat diprioritaskan untuk menempati Rumah Susun PIK Pulo Gadung 2 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur serta difasilitasi penempatan rumah susun tersebut oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Adm. Jakarta Barat
11. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kota Adm. Jakarta Barat
14. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat
16. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat
17. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
20. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat
21. Camat Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat
22. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
23. Lurah Grogol Kota Administrasi Jakarta Barat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0030 Tahun 2026 Tentang Penetapan Daftar Perpindahan Warga Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Lampiran Keputusan Walikota tersebut tidak dapat diunggah (diupload) pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Barat karena di dalam lampirannya memuat data pribadi berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat rahasia dan dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sebagai pengganti unggahan pada JDIH, salinan keputusan beserta lampirannya telah disediakan dalam bentuk:

- a. soft copy (berkas elektronik); dan
- b. hard copy (berkas cetak),

yang dapat diakses dan diperoleh melalui Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.